



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS BENGKULU
SUB UNIT KERJA : UNIVERSITAS BENGKULU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **LIZAR ALFANSI**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK**
3. NHK : **180047**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 565.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 708 m2/250 m2 di KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 527 m2 di KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/40 m2 di KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 266 m2 di KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. Tanah Seluas 433 m2 di CURUP, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 181.000.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, HONDA HONDA BR-V1.5E MTCKD Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SE88/ SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 240.800.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 863.150.596****F. HARTA LAINNYA** **Rp. 269.348.780**

Sub Total **Rp. 2.119.299.376**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.119.299.376

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.